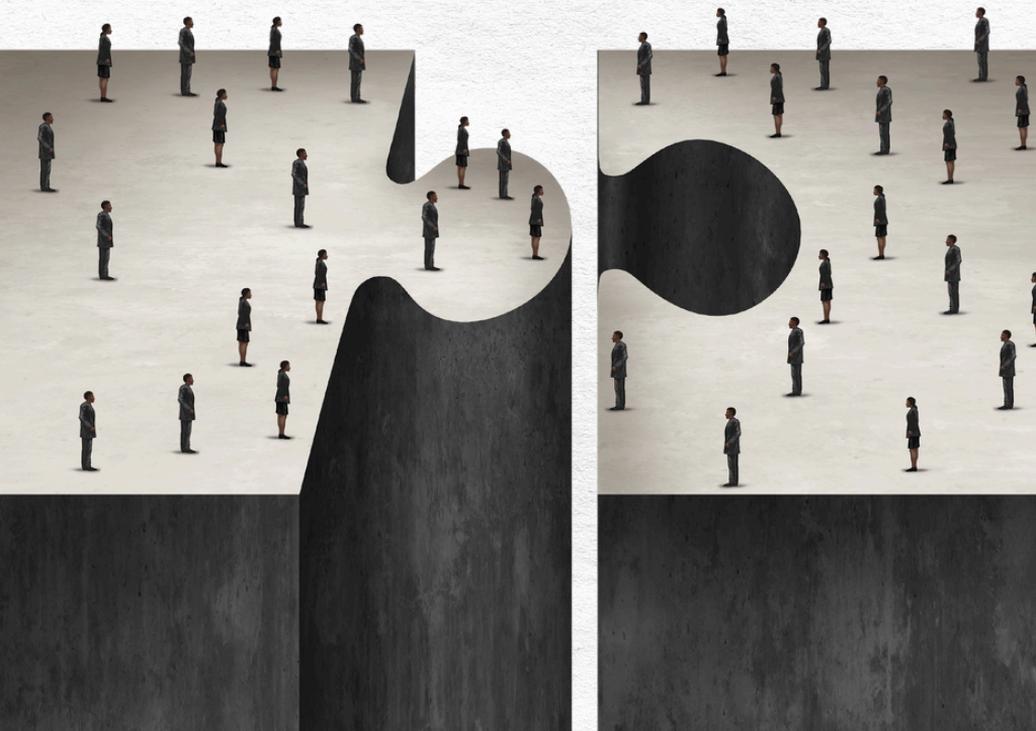


*Buku Saku*  
*Kolaborasi Klub Jurnalis Investigasi*  
*(KJI)*

# “PERKUAT KOLABORASI AWASI KORUPSI”

2024



*Buku Saku Kolaborasi  
Klub Jurnalis Investigasi (KJI)*

**“PERKUAT KOLABORASI  
AWASI KORUPSI”**

**PENYUSUN**

Tibiko Zabar  
Abdul Somad  
Agung Sedayu

**PENYUNTING**

Agus Sunaryanto

**DIPUBLIKASI OLEH**



Indonesia Corruption Watch  
Jalan Kalibata timur ivd/6, Jakarta Selatan

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

**2024**

# LATAR BELAKANG

Pada tahun 2019, ICW bersama Tempo Institute dan sejumlah jurnalis yang memiliki komitmen antikorupsi bersepakat membentuk wadah kolaborasi yakni, Klub Jurnalis Investigasi (KJI). Upaya ini berangkat dari berbagai keresahan akibat regresi demokrasi yang ditandai dengan kriminalisasi terhadap aktivis serta pelemahan pemberantasan korupsi setelah terjadinya revisi Undang-Undang KPK, rekayasa tes wawasan kebangsaan hingga pemilihan komisioner KPK yang sarat masalah.

Situasi itulah yang menebalkan semangat kami untuk mengonsolidasikan kelompok masyarakat sipil dan jurnalis untuk menjadi alternatif gerakan dalam upaya pengawasan dan perlawanan.

Pelemahan terhadap institusi pemberantasan korupsi tentunya berpengaruh pada merajalelanya korupsi bahkan tingkat kerugian negara pun cenderung meningkat. Menurut data tren vonis ICW tahun 2023 memperlihatkan nilai kerugian negara mencapai Rp 56 Triliun. Ironisnya rata-rata hukuman hanya 3 tahun 4 bulan, sedang kerugian akibat korupsi yang diselamatkan negara sebatas Rp 7,3 Triliun saja.

Tentu banyak persoalan lain menyelimuti muramnya pemberantasan korupsi seperti maraknya konflik kepentingan dan korupsi politik dalam penyusunan kebijakan. Pada titik tertentu berbagai persoalan tersebut berkontribusi pada menurunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2023 stagnan dipoin 34.



Situasi itu menunjukkan jika upaya melawan korupsi tidak lagi bisa mengandalkan satu institusi saja. Masyarakat sipil harus membangun jaringan termasuk jurnalis untuk bahu membahu menjadi kekuatan penyeimbang melakukan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Itulah sebabnya peran KJI sebagai wadah kolaborasi antara CSO dan Jurnalis diharapkan dapat memberi warna baru bagi upaya pemberantasan korupsi baik di level pusat maupun daerah.

## KENAPA KOLABORASI?



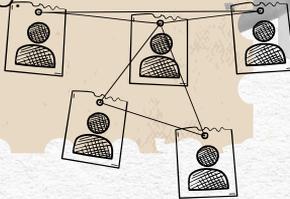
INT EG  
COLL ABO **R A T I O N**

Kolaborasi dalam konteks jurnalisme dan antikorupsi maupun isu lain, sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Sebelum KPK berdiri, organisasi masyarakat sipil banyak berkolaborasi dengan jurnalis dalam riset dan investigasi serta pelaporan kasus dugaan korupsi. Selain itu, advokasi dan kampanye kerap kali membutuhkan peran jurnalis dalam memberitakan agenda organisasi masyarakat sipil.

Situasi demokrasi dan penegakan hukum beberapa tahun belakangan, mengisyaratkan bahwa kolaborasi harus semakin diperkuat. Kolaborasi bisa melahirkan inovasi dan kreatifitas dalam penggarapan liputan maupun taktis advokasi. Pendekatan ini juga meringankan beban kerja dan mitigasi manajemen risiko yang potensial terjadi dari liputan investigasi.

# MENGENAL KLUB JURNALIS INVESTIGASI (KJI)

**Klub Jurnalis Investigasi (KJI) yang diinisiasi oleh Tempo Institute dan ICW**, secara resmi diluncurkan pada 8 November 2019 di Gedung KPK. Sejak dibentuk, ICW dan Tempo Institute terus mengembangkan formulasi yang efektif untuk mengoptimalkan kerja kolaborasi jurnalis bersama CSO.



KJI merupakan inisiatif kolaborasi jurnalis dan organisasi masyarakat sipil di isu antikorupsi dan isu lain yang berdampak pada masyarakat. Secara umum fokus KJI melakukan peningkatan kapasitas jurnalis terkait investigasi kasus korupsi, melakukan penulisan laporan indepth dan investigation serta memperkuat relasi antara CSO dan Jurnalis

Sejak awal berdiri, ICW menjadi tuan rumah bagi KJI Jakarta sedangkan Tempo Institute menyediakan dukungan operasional terkait pelaksanaan liputan termasuk seorang mentor untuk memastikan proses investigasi dan kualitas hasil liputan anggota KJI bermutu.

Pada perkembangannya, bertepatan dengan peringatan hari jadi ICW pada 21 Juni 2021, KJI diperluas ke daerah Banten dan NTT, kemudian tahun 2022 ke Aceh dan Sumatera Utara. Pada tahun 2024 ini, selain di Banten, NTT, Aceh, dan Sumatera Utara KJI juga telah terbentuk di Kalimantan Timur, dan Bali.

Kebutuhan untuk memperluas jaringan (networking) kolaborasi serta menumbuhkan kompetensi investigasi dan kepedulian terhadap isu-isu publik termasuk antikorupsi, menjadi salah satu dasar pijakan pentingnya perluasan gerakan ini.

Tak berbeda dengan di Jakarta, KJI di tingkat lokal juga merupakan kolaborasi jurnalis di tingkat lokal dengan organisasi masyarakat sipil, seperti Banten Bersih di Banten, AJI Kupang di Nusa Tenggara Timur, MaTA di Aceh, SAHdaR di Sumatera Utara, AJI Samarinda di Kalimantan Timur, dan Balebengong di Bali.

Fokus isu disesuaikan dengan kondisi daerah, ada yang terkait korupsi pengadaan barang dan jasa, ada juga terkait korupsi sektor sumber daya alam. Kemudian untuk pendampingan substansi liputan, akurasi data dan keamanan maka ICW tetap mengajak jurnalis Tempo sebagai pendamping.



## TUJUAN PEMBENTUKAN KJI

1. Membangun kerja kolaborasi antara jurnalis dan pegiat antikorupsi cum aktivis organisasi masyarakat sipil dalam melakukan investigasi untuk membongkar dugaan kejahatan publik dan tindak pidana korupsi;
2. Mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara melalui karya jurnalistik;
3. Mendorong perubahan kebijakan publik melalui liputan karya jurnalistik mendalam dan investigasi;
4. Memperkuat jurnalisme investigatif untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis dan mewujudkan media yang berkualitas;
5. Mendorong kolaborasi antar media dalam melakukan kerja-kerja jurnalisme indepth dan investigation

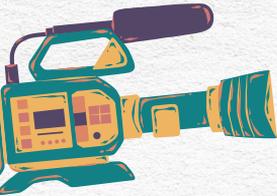
# KEANGGOTAAN KJI

KJI beranggotakan jurnalis dan pegiat antikorupsi yang memiliki ketertarikan mengungkap kejahatan publik. Jurnalis berperan melakukan kerja jurnalistik mulai dari pengumpulan bahan, reportase lapangan dan penulisan liputan investigasi. Sementara pegiat antikorupsi dan CSO membantu proses riset dan memberikan data pendukung, penguatan kapasitas jurnalis, dan kampanye hasil liputan KJI.



## VISI

Menjadi wadah bagi jurnalis untuk menyuarakan kelompok termarjinalkan, antikorupsi, dan menegakkan demokrasi dalam bentuk laporan jurnalistik berbasis liputan investigasi.



## MISI

- Menjadi ruang partisipasi untuk masyarakat sipil agar dapat secara aktif menyuarakan isu antikorupsi melalui liputan investigasi jurnalistik
- Menggalang kolaborasi antara jurnalis, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat suara antikorupsi, demokrasi, dan keadilan dalam karya jurnalistik
- Memberikan pelatihan dan sumber daya kepada masyarakat sipil dan jurnalis guna meningkatkan keterampilan dalam peliputan dan pengungkapan isu ketidakadilan
- Menyebarkan informasi secara luas untuk meningkatkan kesadaran publik akan isu keadilan dan partisipasi dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis
- Mendorong perubahan kebijakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah demi menciptakan lingkungan yang mendukung prinsip demokrasi.

## NILAI DAN KODE PERILAKU

- Anggota KJI berpedoman pada kode etik jurnalistik
- Anggota KJI wajib menjaga independensi, mengutamakan hati nurani, dan berpihak pada masyarakat.
- Anggota KJI wajib menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi nilai demokrasi.
- Anggota KJI tidak menerima suap/amplop.
- Anggota KJI wajib menyampaikan informasi hanya berdasarkan fakta, data dan pendapat yang jelas sumbernya.
- Anggota KJI wajib ikut serta menjaga keselamatan pemberi informasi atau “whistle blower”
- Anggota KJI wajib mengutamakan keselamatan selama melakukan kerja-kerja jurnalistik.
- Anggota KJI harus solid, kompak, dan komitmen dalam bekerja sama dengan anggota KJI lainnya serta organisasi masyarakat sipil dalam liputan jurnalistik investigasi.

## MEKANISME KERJA



Dalam sejumlah kerja advokasi membongkar kasus korupsi, kerja kolaborasi liputan jurnalistik dapat menghasilkan **laporan jurnalistik dengan analisis yang komprehensif**. Sehingga, dapat mendorong dan mempengaruhi pengambilan kebijakan hingga penegakan hukum kasus korupsi.

Salah satu contoh liputan KJI Jakarta tahun 2023 jadi perhatian khalayak di Indonesia yakni, dugaan korupsi pengadaan proyek Menara pemancar **BTS 4G Kominfo**. Liputan KJI Jakarta mengungkap bagaimana skandal persekongkolan dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek merugikan negara hingga dari Rp 8 triliun. Liputan ini dapat dikatakan ikut membantu Kejaksaan mengungkap aktor kakap yang terlibat. Sebab tak lama berselang liputan terbit, Kejaksaan akhirnya menetapkan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka.



**Berdasarkan hal tersebut, proses kerja KJI hingga menghasilkan liputan jurnalistik melalui beberapa tahapan, antara lain:**

**Pertama**, ICW atau para anggota KJI bisa menginformasikan dan mengusulkan sebuah topik liputan. Bahan awal tersebut bisa berupa laporan masyarakat, hasil kajian maupun informasi dari pihak terkait. Pada dua liputan awal KJI, ICW melakukan verifikasi dan kajian lebih lanjut mengenai temuan tersebut.

**Kedua**, diskusi internal anggota KJI dan ICW maupun organisasi masyarakat sipil lain. Pada tahap ini, di grup besar tim akan menindaklanjuti informasi atau temuan awal dalam diskusi terfokus Bersama para anggota. Diskusi tersebut akan membahas apakah bahan tersebut layak didalami atau perlu menggali informasi tambahan lain. Selain itu, jika diperlukan peningkatan kapasitas terkait juga akan diinformasikan pada tahap ini.

**Ketiga**, Tim KJI akan melemparkan tawaran kepada seluruh anggota yang hadir terkait rencana liputan. Mereka yang tertarik kemudian akan dibuatkan grup kecil terfokus untuk menindaklanjuti pada tahap liputan investigasi.

**Keempat**, liputan investigasi dan mentoring. Selama proses investigasi, dibantu oleh seorang mentor. Pada tahap ini banyak pertemuan-pertemuan mentoring keredaksian yang dilakukan.

**Kelima**, mitigasi hukum. Laporan yang akan tayang dapat ditinjau oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers untukantisipasi sengketa pers. Proses peninjauan akan memperoleh sejumlah catatan untuk diperbaiki kembali oleh jurnalis.

**Keenam**, publikasi dan kampanye. Setelah bahan hasil liputan selesai. ICW dan KJI akan membahas bagaimana rencana publikasi dan penyebaran hasil kerja liputan tersebut. Berkaca pada pengalaman liputan sebelumnya, ICW dan KJI mengatur jadwal Bersama untuk merilis hasil liputan, kajian hingga kampanye di media sosial. Selanjutnya, terkait advokasi atau temuan lain akan ditindaklanjuti oleh ICW.

# PANDUAN KEAMANAN



Keamanan KJI merupakan bagian terintegrasi dengan panduan keamanan holistik yang telah disusun oleh sejumlah organisasi profesi jurnalis, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI). Panduan keamanan tersebut masih menjadi pedoman yang dapat digunakan oleh KJI. Berikut tautannya:

- **Panduan Keamanan Digital AJI**

<https://bit.ly/panduankeamanan>

Sementara bagi organisasi masyarakat sipil dapat merujuk pada sejumlah panduan yang disusun oleh organisasi sipil seperti ICW, YLBHI, Greenpeace, dan Auriga. Panduan ini dapat menjadi acuan untuk keamanan CSO dalam melakukan kerja kolaboratif dan keselamatan selama mengungkap kasus korupsi.



- **Panduan Keamanan Aktivistis**

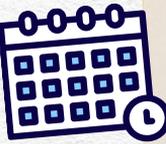
<https://bit.ly/keamanandigital>

Adapun untuk informan yang hendak melaporkan informasi, data, temuan, maupun laporan kejahatan korupsi dapat melalui sistem teknologi keamanan digital tingkat tinggi yang didesain secara khusus bagi para pelapor/pembocor informasi (whistleblower). Seluruh laporan yang masuk bersifat tertutup, sehingga identitas whistleblower dilindungi termasuk anggota KJI atau organisasi masyarakat sipil bahkan tidak mengetahui identitas pelapor.



# STRATEGI PUBLIKASI

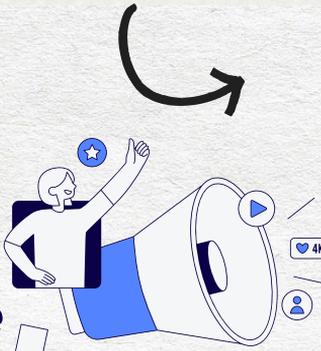
Selain soal proses liputan, salah satu aspek pembeda dari KJI dengan fellowship liputan adalah publikasi dan pengolahan bahan secara kolektif. Seperti dalam penjelasan sebelumnya, kerja kolaboratif KJI tidak hanya sampai liputan terbit, melainkan juga melakukan upaya agar liputan tersebut dapat dibaca oleh banyak pihak. Dalam konteks penerbitan dan publikasi hasil liputan, KJI melakukan beberapa tahapan:



**Pertama**, tim KJI menyepakati jadwal tayang liputan agar diterbitkan serentak. Penayangan secara serentak dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk menciptakan momentum atau konstelasi isu yang tengah berkembang sekaligus pilihan advokasi yang akan dilakukan oleh jejaring CSO yang menjadi bagian dari KJI. Hal ini juga penting didiskusikan dengan matang agar tetap memberikan otoritas kepada redaksi masing-masing dimana jurnalis bekerja. Dalam hal liputan yang tidak bisa terbit di medianya, akan diupayakan melalui media alternatif lain yang berada dalam naungan AJI.



**Kedua**, hasil liputan KJI yang terbit di media masing-masing dikompilasi lalu ditambahkan kalimat pengantar liputan. Bahan tersebut dibagikan ke sejumlah pihak dan kelompok organisasi masyarakat sipil serta pemangku kepentingan. Dalam hal liputan yang tidak bisa terbit di medianya, akan diupayakan melalui media alternatif lain yang berada dalam naungan AJI.



**Ketiga**, Liputan KJI yang telah terpublikasi di media juga diolah menjadi bahan materi kampanye media sosial. Konten tersebut berbentuk visual, grafis, motion, dan audio visual. Produksi dan publikasi konten ini, dilakukan oleh CSO yang terlibat dalam liputan. Saat ini, publikasi konten kampanye bisa disertakan ke akun KJI @jurnalisinvestigasi\_ di Instagram.

# MEKANISME PERLINDUNGAN DATA



1. Setiap bahan-bahan liputan KJI, wajib disimpan dalam data base yang terjamin keamanannya.
2. Dalam hal penyimpanan menggunakan folder bersama, harus dipastikan akses tersebut terbatas, atau dengan memberikan password untuk mengakses
3. Penyimpanan data, KJI bisa melibatkan ICW atau organisasi masyarakat sipil lain yang memiliki sistem database sendiri
4. Penyimpanan bahan hasil liputan harus ada back up
5. Support akses data dapat difasilitasi oleh ICW atau organisasi masyarakat sipil lain.



## PENDANAAN

### Prinsip umum pendanaan KJI antara lain:

- Pendanaan bukan berasal dari hasil kejahatan korupsi, lingkungan, judi online, dan HAM.
- Pendanaan bukan berasal dari instansi pemerintah dan atau badan pemerintahan.
- Pendanaan bersifat tidak mengikat
- Bersifat transparan, akuntabilitas, dan demokratis.
- Seluruh pendanaan yang masuk atas nama KJI akan dikelola secara bersama-sama melalui supervisi dari ICW dan Tempo Institute.



## **VIDEO KJI “PEWARTA MELAWAN RASUAH”**

<https://bit.ly/videokji>



# KONTAK KJI DAERAH

1. KJI Banten | Banten Bersih



@dulurbantenbersih

2. KJI NTT | AJI Kupang



@ajikupang

3. KJI Aceh | MaTA Aceh



@mata\_aceh

4. KJI SUMUT | SAHdaR



@sahdar\_indonesia

5. KJI KALTIM | AJI Samarinda



@ajikotasamarinda

6. KJI Bali | Balebengong



@balebengong

# KONTAK KJI JAKARTA



**INDONESIA**  
CORRUPTION WATCH



Jl. Kalibata Timur IV/D  
No. 6  
Jakarta Selatan 12740



+6221.7994005



+6221.7901885  
+6221.7994015



icw@antikorupsi.org



@jurnaisinvestigasi\_

